

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis moneter yang dimulai pada awal tahun 1997 merupakan krisis yang ditandai merosotnya nilai tukar rupiah, khususnya terhadap dollar AS yang sangat tajam, dari rata-rata Rp 2.450 per dollar AS Juni 1997 menjadi Rp 13.513 akhir Januari 1998. Dampak nyata dari krisis moneter antara lain; negara kesulitan menutup APBN, harga semua komoditi cenderung naik sehingga tingkat inflasi tinggi, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, banyak perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, toko sepi, PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal dan sebagainya. Tapi untungnya oleh pemerintah dinyatakan telah berakhir pada tahun 2004, yang ditandai stabilnya nilai tukar rupiah, tingkat inflasi mencapai dibawah dua digit dan kondisi usaha semakin bergairah.

Krisis moneter ini akhirnya menjadi titik tolak berubahnya pola pikir dan anggapan masyarakat Surakarta (Solo) terhadap usaha PKL. Dalam kultur budaya keraton Jawa, pekerjaan paling terhormat bagi masyarakat Surakarta Hadiningrat adalah pekerjaan sebagai priyayi (abdi negara) sedangkan pekerjaan sebagai pedagang dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Oleh sebab itu pekerjaan sebagai PKL awalnya tidak diminat bagi masyarakat Surakarta.

Dari tinjauan sisi sosial, usaha PKL banyak ditekuni oleh beberapa warga kota dan sekitarnya yang memiliki keterbatasan, terutama memiliki keterbatasan dalam memasuki sektor formal, yaitu warga yang berpendidikan rendah, tuna keahlian dan ketrampilan, memiliki keterbatasan pada kekuatan fisik (perempuan atau tua), modal dan sebagainya.

Ditinjau dari sisi ekonomi, usaha PKL dinilai kurang menjanjikan secara finansial. Usaha PKL berskala kecil sehingga sulit berkembang, tidak mendatangkan penghasilan tinggi dan sering dianggap mengganggu lingkungan dan keindahan kota, sehingga sering dimusuhi pemerintah kota.

Krisis moneter yang diperparah oleh kerusuhan yang berujung terbakarnya fasilitas-fasilitas perkonomian dan trauma pengusaha etnis China, telah mengubah dan membalikkan pandangan masyarakat tentang pekerjaan ini. Banyak warga masyarakat kota dan sekitarnya yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor formal bingung mencari pekerjaan pengganti, akhirnya banyak yang memilih usaha PKL sebagai pilihan alternatif.

Data dari Kantor Pengelolaan PKL menunjukkan bahwa sebelum krisis jumlah PKL di Kota Surakarta diperkirakan hanya 300-an dan mengelompok di beberapa tempat keramaian saja. Tetapi saat krisis moneter berlangsung jumlahnya berkembang pesat, sampai tahun 2004 terdata sekitar 3.390 dan pasca krisis sesuai data per 13 Juni 2006 naik menjadi 5.817 dan menyebar diseluruh pelosok kota, terutama ditempat-tempat strategis dan merupakan daerah larangan usaha PKL. Awal tahun 2010 menurut hasil pemetaan jumlahnya menurun menjadi 2014, karena sebagian PKL yang di relokasi ke Pasar Klitikan Notoharjo (989 PKL) dan sebagian dimasukkan ke pasar tradisional sesuai jenis dagangannya, antara lain ke Pasar Nusukan, Ledoksari, Mojosongo, Sidodadi, Kadipolo, Harjodaksino dan Pasar Gading.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak, peneliti menangkap suatu realitas bahwa usaha PKL sebelum dan saat krisis mutlak dijadikan sebagai pekerjaan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup para PKL (*sub-sistence*), tetapi perkembangan selanjutnya ada beberapa yang telah bergeser tidak lagi sebagai usaha *sub-sistence* tetapi menjadi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan (*welfare*) saat krisis berlalu.

Kondisi PKL sebelum dan saat krisis moneter itu ternyata sesuai benar dengan teori *bazaar economy* dari Clifford Geertz (1963), dan *order theory* serta *regulation theory* dari Evers H.D. yang menganggap PKL itu *sub-sistence*, status quo dan berlandaskan pada prinsip keteraturan. Tetapi setelah krisis moneter berlalu karakteristik PKL itu sedikit banyak telah mengalami perubahan yang cukup berarti. PKL di Kota Surakarta dinilai telah berubah menjadi dinamis, berkembang dalam jenis dagangan dan sampai pada manajemen usaha, selaras dengan perubahan tuntutan kebutuhan konsumen dan kebutuhan dasar

diri PKL (Yetty Sarjana, 2005:110).

Perubahan orientasi usaha menurut Mustafa (1998:87) diyakini dapat mendorong perubahan perilaku dan karakteristik yang sungguh berbeda dengan karakteristik dasarnya. Kenyataan ini tentunya menjadi koreksi dari teori order dan teori regulasi yang berorientasi pada prinsip keteraturan dan kestabilan.

Demikian juga dampak penggunaan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, menjadikan kebijakan penataan, pembinaan dan penertiban PKL sering mendapat perlawanan. Penggunaan Perda No. 8 tahun 1995 dan SK Walikota No. 2 tahun 2003 dinilai banyak kalangan PKL, LSM dan Forum Komunikasi (Forkom) yang peduli dengan keberadaan PKL tidak sesuai lagi dengan realita di lapangan. Konsep penataan dilapangan yang dipakai dalam Perda menunjukkan sikap abigu. Di satu sisi dalam Renstra Kota, PKL diakui keberadaan sebagai katub pengaman sosial khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, tetapi di sisi lain dikaji sebagai patologi sosial.

Berdasarkan realita tersebut maka sangat perlu dilakukan kajian perubahan konsep PKL, terutama perubahan orientasi usaha PKL sebelum, saat dan sesudah terjadi krisis moneter, agar dapat diketahui gambaran tren perubahan perilaku yang dapat dijadikan sebagai teori baru tentang perubahan orientasi usaha serta secara praktis dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat.

B. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan karakteristik PKL dari yang bersifat *subsisten* (sebagai usaha pokok untuk memenuhi kebutuhannya) sebelum dan saat krisis moneter menjadi berorientasi pada kesejahteraan pada pasca krisis. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah orientasi usaha PKL Kota Surakarta sebelum krisis moneter (< tahun 1997), saat (1997-2004) dan sesudah krisis moneter (>2004) terjadi ?
- b. Bagaimana kecenderungan perubahan orientasi usahanya ?